

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis yang diuraikan peneliti di atas dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

#### **A. Kesimpulan**

Kebijakan pemeriksaan tematik yang menilai agenda pembangunan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan dituangkan ke dalam RPJMN perlu dilaksanakan karena BPK merupakan satu-satunya auditor eksternal pemerintah yang dapat melaksanakan pemeriksaan ini. Model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif terpilih menjadi model kebijakan pemeriksaan tematik yang paling tepat untuk saat ini. Dengan penerapan model kebijakan tersebut, keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh BPK terkait dengan sumber daya manusia dan anggaran dapat diselesaikan dengan menerapkan strategi pemeriksaan *project based audit* yang disesuaikan dengan portofolio masing-masing unit kerja pemeriksaan. Sedangkan kelemahan dalam *project based audit* dimana fokus audit per tahunnya berubah, dapat di atasi dengan melakukan audit tindak lanjut (*follow-up audit*) namun harus direncanakan dengan baik agar dapat mencukupi secara waktu dan sumber daya baik manusia maupun anggaran. Pemeriksaan/audit yang dilaksanakan selalu berpegang pada pendekatan *risk based audit* untuk jenis pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan jenis pemeriksaan kinerja pada tahapan awal akan dilakukan penilaian/pembobotan terhadap program/kegiatan atas entitas yang diperiksa melalui metodologi RIAS (*risk, impact, auditability, significant*), di mana objek pemeriksaan yang akan diambil ditentukan oleh risiko-risiko yang dideteksi baik dari pemeriksaan sebelumnya maupun informasi yang beredar di masyarakat. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat antara seluruh unit kerja pemeriksaan di BPK untuk dapat mendukung kebijakan pemeriksaan kolaboratif yang ditetapkan supaya mencapai tujuan.

Kelemahan dari model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif ini yaitu jika terdapat satu saja unit kerja yang tidak berjalan dan tidak mendukung kebijakan

akan berdampak pada kesimpulan atas penilaian terhadap agenda pembangunan nasional.

## **B. Saran**

1. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja di BPK dapat menerapkan kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif dengan penguatan dari sisi perencanaan. Perencanaan dimulai dengan melakukan identifikasi klien utama BPK pada tugas dan fungsi serta hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Kemudian menetapkan kriteria kebijakan yang tepat dan dapat diterapkan mulai dari strategi pemeriksaan, pendekatan sampling, teknis dan mekanisme pelibatan unit kerja pemeriksaan, penetapan prosedur kesimpulan, dan penetapan pelaksanaan *follow-up audit*. Mekanisme pengenalan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan internalisasi juga dibuat pada saat perencanaan model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif ini.
2. Diperlukan perencanaan yang matang untuk dapat menetapkan sebuah kebijakan yang akan diterapkan dan menyasar ke banyak personil di BPK; sistem yang mendukung termasuk bagaimana pengaturan dan pembuatan pedoman yang mendukung dari perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam rangka menyukseskan sebuah kebijakan; sosialisasi yang intensif diperlukan supaya seluruh pelaksana kebijakan dapat memahami tujuan diterapkannya sebuah kebijakan dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan pemahaman yang penuh; dan harus jelas pembagian tugas antara seluruh unit pelaksana tugas baik penunjang maupun pemeriksaan untuk dapat menerapkan sebuah kebijakan baru.
3. Penelitian terkait dengan kebijakan pemeriksaan tematik agenda pembangunan nasional yang menghasilkan model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif ini masih memiliki keterbatasan dalam menguraikan lebih lanjut terkait dengan metodologi penarikan kesimpulan pada ikhtisar hasil pemeriksaan. Penarikan kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk

memberikan penilaian pada satu fokus pemeriksaan, misalnya pada prioritas nasional tertentu dari hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan pada beberapa entitas pemeriksaan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan metodologi penarikan kesimpulan untuk dapat melengkapi penelitian ini.

Selain itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kolaborasi yang terjadi di dalam internal organisasi yang memiliki banyak unit kerja dengan tanggung jawab yang berbeda-beda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S., & Mulyanto, D. (2019). *Isu-Isu Pembangunan Pengantar Teoritis*. PT Gramedia Jakarta.
- Adams, M. B. (1994). Agency Theory and the Internal Audit. *Managerial Auditing Journal*, 9(8), 8–12.
- Baimyrzaeva, M., & Kose, H. O. (2014). The Role of Supreme Audit Institutions In Improving Citizen Participation In Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 15, 77–90.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Juklak Pemeriksaan Kinerja*. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021*. [www.ihps.bpk.go.id](http://www.ihps.bpk.go.id).
- Barman, K. (2009). *Leadership Management Achieving Breakthroughs*. Global India Publications PVT LTD New Delhi.
- Church, B. K., Davis, S. M., & Mcracken, S. A. (2008). The Auditor's reporting model. *Accounting Horizon*, 22(1), 69–90.
- Cordo, G.-S., & Fülöp, M.-T. (2015). Understanding audit reporting changes : introduction of Key Audit Matters. *Accounting and Management Information Systems*, 14(1), 128–152.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Vicky Knight.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (M. Darwin (ed.)). Gadjah Mada University Press.
- Goicoechea, E., Gómez-Bezares, F., & Ugarte, J. V. (2021). Improving audit reports: A consensus between auditors and users. *International Journal of Financial Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.3390/ijfs9020025>
- International Organisation of Supreme Audit Institutions. (2019). *ISSAI 3000: Performance Audit Standard*. [www.issai.org](http://www.issai.org)
- INTOSAI Development Initiative. (2020). *IDI's SDGs Audit Model/ISAM*. <https://www.idi.no>
- Martiana, N. (2018). Badan Pemeriksa Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 3(2), 1–10.
- McNamara, M. (2012). Starting to Untangle the Web of Cooperation,

- Coordination, and Collaboration: A Framework for Public Managers. *International Journal of Public Administration*, 35:6, 389-401
- Nugroho, R. (2018). Public Policy 6 Edisi Revisi (Y. Masda (ed.)). PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2015). *Policy Making*. PT Elex Media Komputindo.
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2015). Basic methods of policy analysis and planning. In *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. <https://doi.org/10.4324/9781315664736>
- Praptitorini, M. D., & Januarti, I. (2011). Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default Dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Going Concern. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(1), 78–93. <https://doi.org/10.21002/jaki.2011.05>
- Prasetyawati, N. (2018). Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 53. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421>
- Putra, F., & Sanusi, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme Teori dan Praktik*. LP3ES.
- Rajaguguk, B. W., Yatnaputra, I. G. B. T., & Paulus, A. (2017). Preparing Supreme Audit Institutions for Sustainable Development Goals. *International Journal of Government Auditing*. <https://doi.org/10.4324/9781003117087-19>
- Sarjono, S. (2015). Reposisi Peranan Pemeriksaan/Audit Dalam Mengawasi Program Pemerintah. *Liquidity*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.32546/lq.v4i1.75>
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2017a). *Metode Penelitian untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2017b). *Metode Penelitian untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sendjaja, D. W., Rismanto, G. Y., & Andrianto, N. (2015). Analisis Kebijakan Publik Dalam Pemeriksaan Kinerja. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 67–81. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.20>
- Setijaningrum, E. (2017). *Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik Best Practise di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Shows, D. W. (2014). *Examining the State of The Field and Possibilities for Collaboration in Organization Development*. ProQuest LLC.
- Suartama, I. K., Nurdin, S., & Susilo, F. S. (2015). Enhancing BPK RI'S Audit Design for People's Welfare: A Practical Approach. *Jurnal Tata Kelola Dan*

Akuntabilitas Keuangan Negara, 1(2), 173–190.

Verma, D (2009). *Decisions-Making Style Social and Creative Dimentions*. Global India Publications PVT LTD New Delhi.

Wibisono, W., Salomo, R. V, & Wijaya, C. (2021). Towards a Mutualism Performance Audit on Local Governments Between Auditor and Community. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji*, 3(1), 539–548.

Wooten, T. C., & Colson, R. H. (2003). Research About Audit Quality. *CPA Journal*, 73(1), 48.  
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=8947806&site=ehost-live>

**Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

**Laporan:**

Laporan Monitoring Pemeriksaan Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021

Laporan Kegiatan Diskusi dengan BAKN DPR RI Pendalaman IHPS II Tahun 2021 atas LHP BUMN dan Badan Lainnya 1 Juli 2022

**Website:**

<https://oag.parliament.nz> website of Office Auditor General New Zealand (OAG NZ)

<https://www.gao.gov> website of U.S. Government Accountability Office (GAO)

<https://www.anao.gov.au> website of Australian National Audit Office (ANAO)